



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
SUB UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUSLIM AISHA**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **631645**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di JEPARA, WARISAN Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 320 m2 di JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m2/82 m2 di JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 188.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 31.683.493**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 526.683.493**III. HUTANG** Rp. 51.900.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 474.783.493

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang



diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.